

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN
PERIODE TRIWULAN I**



**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Laporan Capaian Kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen (BPSI) Lingkungan Pertanian Triwulan I Tahun 2024 dapat diselesaikan pada waktunya berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/311/M.KT.01/2018 tanggal 30 April 2018; Peraturan Menteri Pertanian Nomor: NOMOR 13 TAHUN 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Laporan Capaian Kinerja TW I ini merupakan bagian dari pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam rangka *good governance* dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis selama periode triwulan I.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja BPSI Lingkungan Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BPSI Lingkungan Pertanian sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon III Balai Besar Pengujian Standar Instrumen (BBPSI) Sumberdaya Lahan Pertanian (SDLP), Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian. Adapun fungsi yang diselenggarakan, adalah: a). pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen lingkungan pertanian; b). pelaksanaan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian; c). pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi lingkungan pertanian; d). pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen lingkungan pertanian; e). pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen lingkungan pertanian; f). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian; dan g). pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSI Lingkungan Pertanian.

BPSI Lingkungan Pertanian juga terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah, melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. Tingkat akuntabilitas diwujudkan melalui opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan dan evaluasi atas Laporan Kinerja BPSI Lingkungan Pertanian.

Seluruh kebijakan, program dan kegiatan tahun anggaran 2024 di triwulan I dapat dilaksanakan dengan baik serta tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerjanya telah berhasil dicapai meskipun masih ada kendala blokir anggaran. Adapun pencapaian program yang telah dilaksanakan di BPSI Lingkungan Pertanian adalah realisasi fisik yang telah mencapai 30% dan realisasi anggaran triwulan I sebesar 27,95%, pencapaian ini menunjukkan tingkat efisiensi sehingga output, outcome dan impact tercapai. Diharapkan laporan capaian kinerja ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja BPSI Lingkungan Pertanian pada periode TW I Tahun 2024.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini. Disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan pembuatan Laporan capaian kinerja ini oleh karenanya segala saran perbaikan dapat diapresiasi.

Pati, 31 Maret 2024

Plt. Kepala Balai



Dr. Ir. Ladiyani Retno Widowati, M.Sc.

NIP. 19690303 199403 2 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2024 BPSI Lingkungan Pertanian mendapatkan anggaran DIPA sebesar Rp. 8.325.691.000,- untuk dikelola. Realisasi serapan anggaran Tahun 2022 Triwulan I mencapai Rp. 2.327.141.705,- atau 27,95%. Indikator kinerja sasaran BPSI Lingkungan Pertanian yang tercantum didalam perjanjian kinerja (PK) tahun anggaran 2024, yaitu: 1). meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian dengan indikator kinerja satu rancangan standar (RSNI) instrumen lingkungan pertanian yang dihasilkan; 2). terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja nilai zona integritas (ZI) sebesar 81, dan 3). terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel dengan indikator nilai kinerja anggaran (NKA) sebesar 87 mengacu pada nilai SMART-DJA.

Nilai capaian kinerja BPSI Lingkungan Pertanian pada periode TW I baru dapat diakses melalui penilaian indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) dan e-monev Bappenas. Adapun aplikasi e-SAKIP dan SMART DJA belum dapat menampilkan hasil penilaian pada periode TW I. Berdasarkan penilaian IKPA capaian kinerja hingga periode Maret 2024 (TW I) sebesar 99,97% dan berdasarkan aplikasi e-monev Bappenas sebesar 66,67%. Selain capaian kinerja berdasarkan PK dan berdasarkan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, pada tahun 2024, beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan BPSI Lingkungan Pertanian tahun 2024, diantaranya adalah: 1). Adanya blokir anggaran *automatic adjustment* (AA) sebesar Rp. 78.301.000,- dan blokir non AA Rp. 303.832.000,- menyebabkan realisasi penyerapan anggaran menjadi terhambat dan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena diblokir seluruhnya.

Menindaklanjuti permasalahan yang ada, maka langkah dan antisipasi yang dapat dilakukan pada tahun yang akan datang, adalah: 1). penyempurnaan rencana strategis (renstra) sesuai dengan perubahan lingkungan strategis dan tetap mengacu pada renstra BSIP; 2). meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal agar pelaksanaan kegiatan berjalan solid dan terintegrasi pada setiap kegiatannya serta penyerapan anggaran terealisasi secara

optimal; dan 3). Perlunya sosialisasi kegiatan dan perjanjian kinerja (PK) kepada seluruh pejabat dan pejabat fungsional untuk pencapaiannya sebagai tugas bersama.

LAPORAN CAPAIAN KINERJA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN PERIODE TRIWULAN I

I. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan menyatakan bahwa sarana prasarana pertanian mulai dari benih, bibit, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian harus memenuhi standar mutu dan disertifikasi. Berdasarkan hal tersebut Kementerian Pertanian melaksanakan reorganisasi dengan membentuk Unit Kerja Eselon 1 yang memiliki tugas standardisasi instrumen pertanian dan disahkan melalui Peraturan Presiden 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian. Peraturan Presiden tersebut diikuti dengan terbitnya Permentan 19 tahun 2022 yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pusat dan Balai Besar lingkup Kementerian Pertanian dan Permentan 13 tahun 2023 yang mengatur SOTK UPT (Balai) lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP).

Balai Pengujian Standar dan Instrumen Lingkungan Pertanian (BPSI Lingkungan Pertanian) sebagai salah satu UPT lingkup BSIP, mengacu pada Permentan Nomor 13 tahun 2023 pasal 138 ayat 2 Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian (BPSI Lingkungan Pertanian) dalam pelaksanaan tugas pengujian standar instrumen lingkungan pertanian BPSI Lingkungan Pertanian dikoordinasikan oleh Unit Kerja (UK) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPSI SDLP). Adapun fungsi BPSI Lingkungan Pertanian mengacu pada Permentan Nomor 13 tahun 2023 pasal 139 adalah sbb:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen lingkungan pertanian;
2. Pelaksanaan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian;
3. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi lingkungan pertanian;
4. Pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen lingkungan pertanian;
5. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen lingkungan pertanian;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian; dan

7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian

Dalam melaksanakan tupoksinya BPSI Lingkungan Pertanian terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara. BPSI Lingkungan Pertanian memiliki 4 orang pejabat fungsional ASTA, 7 orang pejabat fungsional PMHP, 1 orang pejabat fungsional POPT, dan 15 orang pejabat fungsional teknisi litkayasa. Selain itu BPSI Lingkungan Pertanian juga didukung oleh SDM dari kelompok fungsional umum yang melaksanakan fungsi administrasi, keuangan, kepegawaian, dan urusan ketatausahaan lainnya. SDM di BPSI Lingkungan Pertanian terdiri dari 50 orang ASN, 1 orang P3K, dan 26 tenaga PPNPN sehingga jumlahnya sebanyak 77 pegawai.

Selain dukungan SDM, BPSI Lingkungan Pertanian juga didukung dengan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang meliputi laboratorium, *smart greenhouse*, rumah kaca, Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP), gedung auditorium, gudang alsintan dan lain-lain. Laboratorium dimanfaatkan untuk mendukung tugas pengujian dan pengelolaan produk instrumen pertanian terstandar serta melaksanakan layanan pengujian parameter emisi gas rumah kaca (GRK), mutu dan residu pestisida, dan cemaran logam berat di lingkungan pertanian.

II. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024 BPSI Lingkungan Pertanian mendapatkan anggaran DIPA sebesar Rp. 8.325.691.000,- untuk dikelola. Indikator kinerja sasaran BPSI Lingkungan Pertanian yang tercantum didalam perjanjian kinerja (PK) tahun anggaran 2024 sebagai berikut (Tabel 1).

Tabel. 1. Perjanjian Kinerja BPSI Lingkungan Pertanian TA. 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dhasilkan	Standar (RSNI)	1
2.	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta pengelolaan Anggaran yang akuntabel	Nilai Zona Integritas (ZI) BPSI Lingkungan Pertanian	Nilai	81
		Nilai Kinerja Anggaran BPSI	Nilai	87

		Lingkungan Pertanian (Nilai SMART)		
--	--	------------------------------------	--	--

III. Pelaporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada ketentuan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Progress capaian kinerja BPSI Lingkungan Pertanian periode triwulan I adalah sebagai berikut (Tabel 2).

Tabel 2. Progress capaian kinerja BPSI Lingkungan Pertanian periode TW I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Progres (%)
1.	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	Standar (RSNI)	1	30
2.	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	Nilai Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	Nilai	81	30
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian (Nilai SMART)	Nilai	87	30
Rata-Rata Capaian Kinerja					
Pagu Anggaran			Rp.	8.325.691.000	
Realisasi Anggaran (basis SP2D)			Rp.	2.327.140.449 (27,95%)	

a. Capaian output kinerja indikator sasaran kinerja ke-1 (ISK1) yaitu jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan dengan target 1 standar (RSNI) masih terkendala adanya blokir pagu anggaran. Pada tahun 2024, BPSI Lingkungan Pertanian memiliki 4 PNPS yang telah ditetapkan oleh BSN melalui SK Kepala BSN Nomor 2/KEP/BSN/1/2024 untuk dirumuskan menjadi RSNI pada 3 komite teknis (komtek) yang berbeda, yaitu:

1. Kualitas tanah — Penentuan pestis organoklorin melalui kromatogra dengan deteksi selektif massa (KG SM) dan kromatogra gas dengan deteksi penangkapan elektron (KGDPE) dengan ruang lingkup metode penentuan kuantitatif pestisida organoklorin dan klorobenzena sem volatil di tanah dan sedimen, menggunakan KG-SM dan KG-DPE. Perumusan RSNI melalui komtek 65-23 Sumberdaya Lahan Pertanian (SDLP).
2. Pedoman Penggunaan Agens Pengendali Hayati (APH) – bagian Mikrobial dengan ruang lingkup pedoman penggunaan/penerapan agens pengendali hayati (APH) mendukung sistem pertanian berkelanjutan. Perumusan RSNI melalui komtek 65-24 Pertanian Berkelanjutan (PB)
3. Pedoman Pengelolaan Hama Terpadu Ulat Grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) dengan ruang lingkup pedoman pengelolaan hama terpadu untuk ulat grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) pada tanaman jagung. Perumusan RSNI melalui komtek 65-24 Pertanian Berkelanjutan (PB)
4. Revisi SNI 7313:2008: Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida pada Produk Hasil Pertanian. Perumusan RSNI melalui komtek 65-22 Pascapanen Pertanian.

Progress dari ke-empat PNPS tersebut masih 30% karena saat ini hanya bisa melaksanakan koordinasi internal tim konseptor terkait penyusunan draft RSNI0 yang nantinya akan dibahas dalam FGD untuk menjadi RSNI1 sebagai bahan perumusan RSNI2, RSNI3 melalui rapat teknis di komtek terkait. Khusus RSNI Revisi BMR Pestisida tim dari BPSI Lingkungan Pertanian berkolaborasi dengan tim dari BBPSI Pascapanen sebagai tim konseptor.

b. Capaian output kinerja pada indikator sasaran kinerja ke-2 (ISK2) yaitu Nilai Zona Integritas (ZI) BPSI Lingkungan Pertanian sebesar 81 juga terkendala adanya blokir sebagian anggaran. Pada periode triwulan I ini beberapa progress capaian kinerja pada ISK2 sebesar 30% yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan survey SPAK, SPKP, dan penilaian mandiri ZI Lingkup BSIP
Sesuai surat dari BSIP nomor B-360/RC.010/H.1/02/2024 satker diminta melakukan penilaian mandiri melalui survey SPAK dan SPKP kepada stakeholder yang menerima pelayanan pada periode 1-2 bulan sebelumnya.

Survey dilaksanakan secara online dengan cara para penerima layanan memberikan penilaian melalui survey pada formulir yang telah ditetapkan oleh BSIP untuk masing-masing satker. Adapun link untuk BSIP lingkungan yaitu <https://bit.ly/Kementan-BPSILP>. Dari survey tersebut diperoleh 35 responden dengan nilai survey SPAK 3,56 dan nilai survey SPKP 3,66. Adapun hasil penilaian mandiri ZI diperoleh nilai 87,69 (Gambar 1).

No	Satuan Kerja	Laporan SPKP dan SPKP	Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)	Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Penilaian Mandiri ZI								
		Jumlah Responden	Tanggal Selesai Survei	Nilai Survei	Nilai PM ZI								
1	Sekretariat BSIP				85.72								
20	BPSI Unggas dan Aneka Ternak	v	38	18 Maret 2024	3.79	38	18 Maret 2024	3.66	92.10	28 Maret 2024	https://bit.ly/ZI/UAU2024	Lengkap	
21	LPSI Ruminansia Besar	v	44	25 Maret 2024	3.80	44	25 Maret 2024	3.59	93.58	28 Maret 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1KvY0U...	Lengkap	
22	LPSI Ruminansia Kecil	v	37	18 Maret 2024	3.65	37	18 Maret 2024	3.5	90.12	28 Maret 2024	https://bit.ly/LPSI-RK2024	Lengkap	
23	BPSI Mekan	v	38	08 Maret 2024	3.59	38	08 Maret 2024	3.54	90.99	31 Maret 2024	https://bit.ly/Evaluasi-2024	Lengkap	
24	BPSI SDLP	v	144	25 Maret 2024	3.53	144	25 Maret 2024	3.37	84.74	28 Maret 2024	ZI BPSI SDLP	Lengkap	
25	BPSI Pertanian Lahan Rawa	v	27	5 April 2024	3.18	27	5 April 2024	3.20	86.00	30 April 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1ubZUk...	Lengkap	link yang dikirim bukan link data dukung penilaian mandiri
26	BPSI Tanah dan Pupuk	v	44	29 Maret 2024	3.54	44	29 Maret 2024	3.48	85.71	31 Maret 2024	https://bit.ly/ZI_BPSI_TanahPupuk2024	Lengkap	
27	BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	v	34	5 April 2024	3.590	34	5 April 2024	3.421	84.14	18 April 2024	File ZI BPSI Agroklimat dan Hidrologi P...	Lengkap	
28	BPSI Lingkungan Pertanian	v	35	25 Maret 2024	3.59	35	25 Maret 2024	3.65	97.99	28 Maret 2024	https://bit.ly/ZI_BPSI_Lingkitan_2024	Lengkap	
29	BPSI Biogas	v	31	21 Maret 2024	3.84	31	21 Maret 2024	3.57	95.01	28 Maret 2024	https://drive.google.com/drive/folders/14e...	Lengkap	
30	BPSI Pasapangan Pertanian	v	68	22 Maret 2024	3.63	68	22 Maret 2024	3.32	82.87	28 Maret 2024	https://bit.ly/Evaluasi_ZI_BSP-Pasapangan	Lengkap	
31	BPSIP	v	55	28 Maret 2024	3.45	55	28 Maret 2024	3.31	88.73	19 April 2024	https://bit.ly/L&RTm10	Lengkap	Link data dukung bukan penilaian mandiri ZI sampai dengan Triwulan 1 2024
32	BPSIP Aceh	v	31	3 April 2024	3.79	31	3 April 2024	3.63	84.55	29 April 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1e0Q53...	Lengkap	
33	BPSIP Sumatera Utara	v	35	27 Maret 2024	3.55	35	27 Maret 2024	3.46	92.54	27 Maret 2024	https://drive.google.com/drive/folders/11TXpu...	Lengkap	
34	BPSIP Sumatera Barat	v	39	29 Maret 2024	3.58	39	29 Maret 2024	3.58	on process	28 Maret 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1sVZ24...	Lengkap	LKE PM ZI tidak tersedia pada link data dukung
35	BPSIP Riau	v	77	25 Maret 2024	3.59	77	25 Maret 2024	3.59	94.70	29 Maret 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1Rt...	Lengkap	
36	BPSIP Jambi	v	43	29 Maret 2024	3.68	43	29 Maret 2024	3.593	99.70	28 Maret 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1s6Duf...	Lengkap	LKE PM ZI tidak tersedia pada link data dukung
37	BPSIP Bangka Belitung	v	40	28 Maret 2024	3.56	40	28 Maret 2024	3.55	on process	28 Maret 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1s6Duf...	Lengkap	Belum ada hasil penilaian mandiri ZI
38	BPSIP Sumatera Selatan	v	34	1 April 2024	3.81	34	1 April 2024	3.79	88.71	1 April 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1PhUj0...	Lengkap	LKE PM ZI tidak tersedia pada link data dukung
39	BPSIP Lampung	v	78	1 April 2024	3.43	78	1 April 2024	3.19	On Process	1 April 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1s6C31...	Lengkap	LKE PM ZI tidak tersedia pada link data dukung dan belum mengirim laporan SPAK dan SPKP ke email eva9a2021@gmail.com
40	BPSIP Bengkulu	v	41	28 Maret 2024	3.67	41	28 Maret 2024	3.54	On Process	28 Maret 2024	https://bit.ly/Document-ZI-BPSIBengkulu2024	Lengkap	LKE PM ZI tidak tersedia pada link data dukung
41	BPSIP Banten	v	59	19 Maret 2024	3.6	59	19 Maret 2024	3.3	88	28 Maret 2024	https://drive.google.com/drive/folders/19244...	Lengkap	
42	BPSIP DKI Jakarta	v	31	19 Maret 2024	3.75	31	19 Maret 2024	3.58	85.44	31 Maret 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1yVg10...	Lengkap	
43	BPSIP Jawa Barat	v	60	25 Maret 2024	3.49				on process	28 Maret 2024	https://drive.google.com/drive/folders/12uXwU...	Lengkap	Link data dukung PM ZI kosong
44	BPSIP Jawa Tengah	v	45	30 Maret 2024	3.51				on process			Lengkap	belum mengali link data dukung PM ZI
45	BPSIP DI Yogyakarta	v	43	2 April 2024	3.65				on process			Lengkap	LKE PM ZI tidak tersedia pada link data dukung dan belum mengirim laporan SPAK dan SPKP ke email

Gambar 1. Hasil survey SPAK dan SPKP serta penilaian mandiri ZI Lingkup BSIP

2. Melaksanakan peningkatan kualitas layanan BPSI Lingkungan Pertanian

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada stakeholder, BPSI Lingkungan Pertanian melakukan upaya-upaya peningkatan layanan seperti studi banding, menambah fasilitas layanan untuk disabilitas, pengembangan sistem layanan online dll.
- c. Capaian output kinerja pada indikator sasaran kinerja ke-3 (ISK3) yaitu Nilai Kinerja Anggaran BPSI Lingkungan Pertanian (Nilai SMART) sebesar 87 juga terkendala adanya blokir sebagian anggaran. Adapun capaian kinerja samapi dengan saat ini sebesar 30%. Hal ini berdasarkan pada realisasi anggaran dan juga pengisian caput dan nilai indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) periode triwulan I (Gambar 2). Nilai IKPA triwulan I (periode Januari-Maret 2023) sebesar 99,97% (Gambar 2) dan nilai kemanfaatan berdasarkan e-monev Bapennas mencapai 66,67% (Gambar 3).

Adapun nilai SMART DJA belum ditayangkan sehingga belum bisa diketahui untuk nilai SMART periode triwulan I.

Adapun realisasi serapan anggaran pada TW I adalah 2.327.140.449 (27,95%) dari total pagu anggaran. Adanya blokir anggaran *automatic adjustment* (AA) sebesar Rp. 78.301.000,- dan blokir non AA Rp. 303.832.000,- menyebabkan realisasi penyerapan anggaran menjadi terhambat dan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena diblokir seluruhnya.

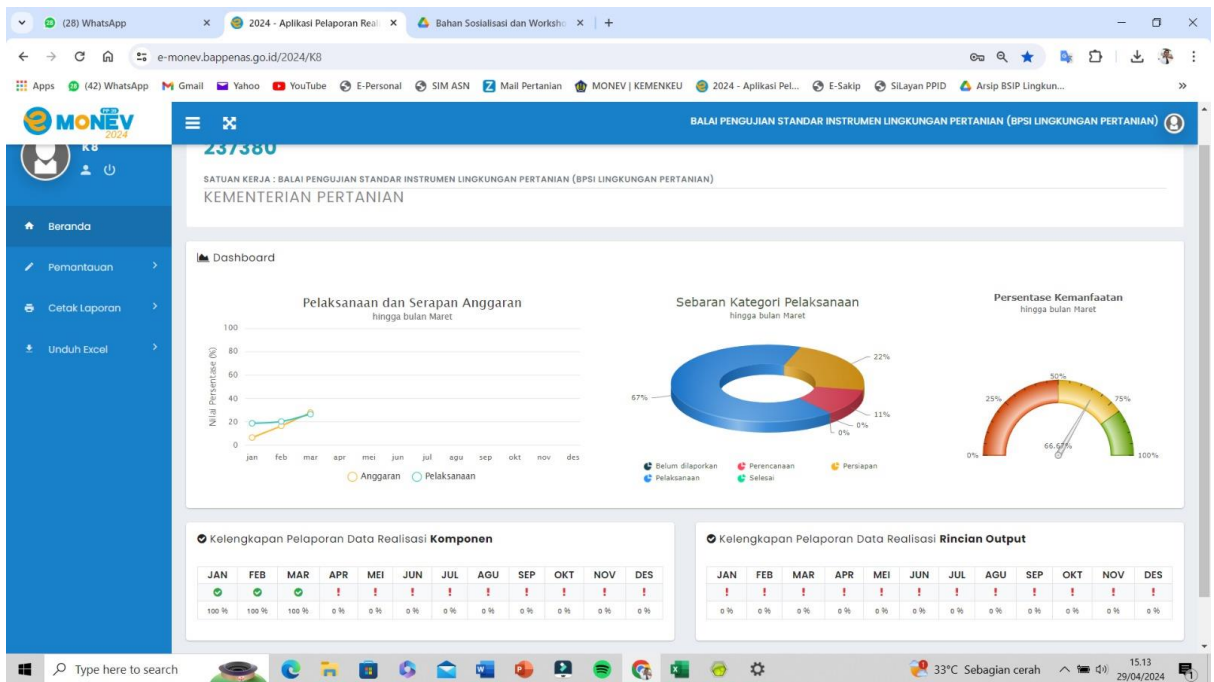
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)			
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	Nilai Total		Konversi Bobot		
1	097	018	237380	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.73	100.00	100.00	99.97	100%	99.97		
				Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25						
				Nilai Akhir	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	9.97	5.00	25.00						
				Nilai Aspek	100.00					99.95		100.00						

Gambar 2. Nilai IKPA periode TW I (Januari-Maret) TA 2024



Gambar 3. Tangkapan layar e-monev Bappenas periode TW I TA 2024

IV. Rencana Tindak Lanjut

Menindaklanjuti permasalahan yang ada, maka langkah dan antisipasi yang dapat dilakukan pada tahun yang akan datang, adalah: 1). penyempurnaan rencana strategis (renstra) sesuai dengan perubahan lingkungan strategis dan tetap mengacu pada renstra BSIP; 2). meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal agar pelaksanaan kegiatan berjalan solid dan terintegrasi pada setiap kegiatannya serta penyerapan anggaran terealisasi secara optimal; dan 3). Perlunya sosialisasi kegiatan dan perjanjian kinerja (PK) kepada seluruh pejabat dan pejabat fungsional untuk pencapaiannya sebagai tugas bersama.